

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi (Romney dan Steinbart, 2018:36). Hal senada dikemukakan Bodnar dan Hopwood (2013:1) Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti orang dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan lainnya menjadi informasi. Serta sistem informasi akuntansi telah dijelaskan oleh Urquia, Perez dan Munoz (2011) dan Trabulsi (2018) sebagai sistem yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan suatu bisnis atau organisasi.

Sesuai dengan visi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Auditor Presiden yang responsif, interaktif dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih serta sesuai amanat. PP 60 tahun 2008 pasal 59 ayat (2) dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011, BPKP, dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Dengan menyusun suatu program aplikasi yang dapat digunakan oleh pemda dalam rangka pengelolaan keuangan daerahnya. Program aplikasi yang dimaksud adalah

Program Aplikasi Komputer SIMDA. Hal ini penting guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah menuju terwujudnya *good governance*.

Bagian penting dari sistem informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam organisasi adalah sistem informasi akuntansi (Samuel, 2013). fungsi utama sistem informasi akuntansi adalah pengumpulan data, pemeliharaan data, sistem akuntansi informasi data dan manajemen pengetahuan, kontrol data / keamanan dan pembuatan informasi (Ternenge dan Boniface, 2016). Sistem informasi akuntansi (SIA) dalam suatu organisasi memainkan peran penting dalam membantu untuk mengadopsi dan mengelola posisi keuangan yang strategis (Bakri, 2016). demi Pencapaian tujuan memerlukan pengumpulan data di setiap kegiatan (Romney dan Steinbart, 2015: 39). Sebab sistem informasi akuntansi bergantung pada kualitas input data, karena buruknya kualitas data yang digunakan dalam proses input mengarah pada hasil yang buruk (Xu, 2003).

Sistem informasi akuntansi yang berkualitas merupakan kemampuan sistem informasi akuntansi untuk memproses data keuangan dan menghasilkan informasi akuntansi yang berguna bagi para pengambil keputusan (Fitrios *et al.*, 2018). Kualitas sistem informasi akuntansi itu berfungsinya sistem informasi akuntansi secara andal, efisien dan efektif sebagai penyedia informasi akuntansi yang berkualitas (Susanto, 2017a). Kualitas sistem informasi yang baik memiliki beberapa karakteristik, antara lain: keandalan, integrasi dan aksesibilitas ((Bocij, Greasley dan Hickie (2015:392), Darma *et al.* (2018)), ketepatan waktu (Ong, Day dan Hsu, 2009), fleksibel dan efisien(Stair dan Reynolds, 2010:57).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, pemerintah selaku perumus dan pelaksanaan kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk informasi keuangan daerah. Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah dan Pemerintah Daerah (PEMDA) berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Pada saat ini dapat diketahui bahwa sistem informasi akuntansi berbagai organisasi di Indonesia tidak memiliki kualitas yang baik karena tidak dapat disajikan tepat waktu, akurat dan relevan, tidak disajikan secara lengkap, tidak aman digunakan, sulit diakses, presentasi tidak mengikuti standar / pedoman dan kurang bisa dipahami oleh berbagai pengguna (Susanto 2017b). Beberapa peneliti mengatakan sistem informasi akuntansi yang belum memiliki kualitas yang baik, seperti: pendidikan tinggi (Susanto 2017c) lembaga keuangan ((Mulyani, Darma, dan Sukmadilaga (2016), Darma (2017)), Badan Usaha Milik Negara (Ladewi *et al.* 2017) dan lembaga zakat (Nurhayati and Susanto 2017).

Tanpa sistem informasi akuntansi yang berkualitas, tidak akan ada informasi akuntansi yang berkualitas (Sacer *et al.*,2006:62). PEMDA yang ingin memiliki

Sistem Informasi Akuntansi yang berkualitas harus bisa: terintegrasi dan keandalan (*reliability*). Integrasi yang terkait dengan semua komponen di dalam sistem (*hardware, software, brainware, database*, prosedur dan jaringan komunikasi) bersinergi dalam SIA untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh manajemen dalam membantu proses pengambilan keputusan (Satzinger, Jackson dan Burd, 2009:7). Keandalan berhubungan dengan kemampuan sistem yang dapat berfungsi dengan benar dan memberikan informasi yang akurat (Baltzan, 2014:185).

Namun dalam kenyataannya, sistem informasi akuntansi di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih jauh dari harapan atau belum terintegrasi dengan baik. Hasrimy (2019) selaku Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Kota Medan mengatakan masih ada beberapa perbedaan-perbedaan pemahaman antar OPD terkait kelengkapan data yang dikumpulkan. Untuk itu, diperlukan pembuatan standar dan regulasi termasuk hal-hal tambahan yang berkaitan dengan perwujudan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang juga dikenal dengan istilah *e-Government*, seperti penerapan tanda tangan elektronik pada masing-masing OPD dan koordinasi pengumpulan data dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut. Dashboard Pimpinan (Dashboard *Executive*) sudah siap, hanya tinggal mengintegrasikan data dan aplikasi yang ada pada OPD. Untuk data, setiap OPD masih perlu mengemas data dengan baik sehingga data yang tampil mudah dibaca oleh pimpinan dan memberikan informasi saat disajikan. Meskipun saat ini banyak pemerintah daerah telah menerapkan *e-Government* namun belum terintegrasi dengan baik sehingga tidak

terhubung satu dengan yang lain (Abnur, 2016). Syafruddin (2019) selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan bahwa tata kelola pemerintah yang masih silau dengan *e-government*, berdampak pada tidak terintegrasinya sistem aplikasi milik instansi pemerintah maupun lembaga dan berakibat pada pemborosan anggaran.

Eldin (2019) selaku wali kota Medan mengatakan bahwa terjadi kendala dalam pelaporan keuangan di ODP sehingga berdampak pada pelaporan keuangan daerah dan penilaian terhadap tata kelola keuangan pemerintah kota Medan, semua ini disebabkan adanya kelemahan pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah pada Pejabat Penatausahaan Keuangan serta bendahara perangkat daerah. Hutajulu (2017) selaku Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumut, menilai kondisi carut-marutnya website yang tidak bagus dan tidak ter-update pada OPD yang di akibatkan dari tidak adanya perhatian khusus pimpinan instansi terkait untuk menjaga agar keberadaan sarana informasi online tetap informatif. Sedangkan target PEMDA akhir 2019 semua Organisasi Perangkat Daerah terintegrasi secara keseluruhan (Rajekshah, 2019).

Selain integrasi sistem, sistem informasi akuntansi pada OPD dikatakan belum handal. Dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ada beberapa temuan tentang kelemahan sistem pengendalian intern atas LKPD tahun 2017 pada pemerintahan daerah diantaranya pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan. Serta temuan tentang sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, diantaranya sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung

sumber daya manusia yang memadai. Sedangkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPRD Kota Medan menilai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak memiliki motivasi atau keseriusan didalam menaikkan target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah. Hasyim (2019) selaku Ketua Fraksi FPDIP mengatakan informasi dan keluhan masyarakat bahwa dalam pengurusan surat izin mendirikan bangunan (SIMB) di Kota Medan saat ini sangat rumit dan membingungkan masyarakat. Hal ini disebabkan karena pegawai yang bekerja pada dinas tersebut dalam pengurusan SIMB belum memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman dan handal dalam penanganan penerbitan SIMB. Tentunya ini merugikan Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Oleh karena itu, kami mendesak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan evaluasi dan perbaikan terkait pengurusan penerbitan SIMB tersebut.

Berdasarkan observasi yang dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa kendala tentang penggunaan sistem informasi akuntansi daerah. Beberapa pegawai OPD belum paham menganalisis data pada Sistem Informasi Akuntansi yang ada, dikarenakan latar belakang pendidikan tidak dibidang akuntansi yang menghambat sedikit kesulitan dalam menggunakan sistem. Sistem informasi Akuntansi yang ada pada OPD tidak selalu terhubung dengan OPD lainnya, karena ada waktu tertentu dan hanya pegawai keuangan yang memiliki password / akses yang dapat masuk ke sistem, bahkan pengolahan data awal masih berbasis manual.

Kualitas sistem informasi akuntansi di Organisasi Perangkat Daerah disebabkan oleh budaya organisasi sebagaimana Leidner dan Kayworth (2006) mengatakan bahwa memahami budaya organisasi itu penting untuk menilai sistem informasi. Budaya organisasi mengacu pada sistem makna bersama yang dipegang oleh anggota yang membedakan satu organisasi dari organisasi lain (Robbins dan Judge 2013:512). Ahuja dan Thatcher (2014) mengatakan bahwa aspek budaya dapat mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam inovasi. Budaya menjadi penting tidak hanya ketika sistem informasi yang dibuat dan dikembangkan, tetapi harus tetap dipertimbangkan ketika sistem informasi dilaksanakan (Wisma, 2015).

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian tentang pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Endraria (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh budaya organisasi dan disiplin terhadap kualitas sistem informasi akuntansi di badan manajemen keuangan dan aset daerah pemerintah, telah membuktikan bahwa budaya organisasi mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi. Berikutnya Bakri (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh penggunaan teknologi informasi dan budaya organisasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Hasil penelitian mengatakan bahwa budaya organisasi mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi pada tahap perancangan dan implementasi sistem. Kemudian Rapina (2014) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi dan implikasinya pada kualitas informasi akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Selanjutnya Budi (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh budaya organisasi dan struktur terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Hasil penelitian mengatakan bahwa ada pengaruh signifikan budaya organisasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Begitu pula Wisma (2015) meneliti tentang budaya organisasi dan dampaknya pada kualitas sistem informasi akuntansi. Hasil penelitian mengatakan bahwa budaya organisasi mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi di OPD adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi dapat meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi (Susanto, 2017a). Colquitt, Lepine dan Wesson (2015:64) mengatakan komitmen organisasi merupakan suatu keinginan karyawan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Komitmen organisasi menentukan apakah seorang karyawan tetap menjadi anggota organisasi (dipertahankan) atau pergi untuk mengejar pekerjaan lain. Hal senada Jex (2002:133) mengatakan bahwa komitmen organisasi dapat dianggap sebagai sejauh mana karyawan didedikasikan untuk organisasi yang mempekerjakan mereka dan bersedia untuk bekerja atas namanya, serta kemungkinan akan mempertahankan keanggotaannya.

Mengembangkan tenaga kerja dari karyawan yang berkomitmen adalah tugas yang berat bagi organisasi, terutama bagi mereka yang tertarik mempertahankan karyawan generasi baru yang sering disebut Millennials (McAllister dan Ferris, 2016).

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian tentang pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Susanto (2017)

melakukan penelitian tentang pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Hasil penelitian mengatakan bahwa komitmen organisasi mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi. Berikutnya Iskandar (2015) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi. Hasil penelitian berdasarkan analisis deduktif yang mendukung fenomena kemudian mencari bukti melalui fakta empiris, menyatakan bahwa Komitmen manajemen mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi. Selanjutnya Rapina (2014) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi dan implikasinya pada kualitas informasi akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen manajemen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi.

Selain budaya organisasi dan komitmen organisasi, kompetensi pengguna merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi di OPD. Kompetensi pengguna yang menjadi faktor penting ketika sistem informasi dibuat dan dikembangkan (Endraria 2016). Dubois *et al* (2004:16) mengatakan bahwa kompetensi merupakan karakteristik yang dimiliki dan digunakan individu dengan cara yang tepat dan konsisten untuk mencapai kinerja yang diinginkan.

Sedangkan Fery (2015) menjelaskan bahwa kompetensi pengguna mengacu pada karakteristik individu yang terlihat seperti pengetahuan, keterampilan, keahlian, Selain itu, perusahaan harus memiliki keandalan perangkat lunak dan basis data.

Kompetensi merupakan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu maupun manager perusahaan, serta memiliki rasa tanggung jawab

dalam bekerja. Dalam memenuhi kebutuhan informasi pengguna harus memiliki kompetensi yang sering disebut sebagai keterampilan (Fery 2015). Kompetensi setiap individu dalam melakukan pekerjaan harus tetap diterapkan untuk menghasilkan kualitas sistem informasi akuntansi yang berkualitas. Hubungan antara sistem informasi akuntansi yang berkualitas dengan kompetensi pengguna adalah adanya rasa tanggung jawab dalam bekerja dari segi keterampilan sampai pengetahuan yang dimiliki para pekerja demi mendapatkan hasil yang diinginkan.

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi pengguna terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Nuswantoro dan Abdul (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh sistem informasi pengguna kompetensi terhadap kepuasan pengguna sistem informasi penerimaan mahasiswa baru di universitas swadaya gunung jati. Hasil penelitian mengatakan bahwa kompetensi pengguna informasi memiliki efek positif dan signifikan terhadap konstruk kepuasan pengguna secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi yang memiliki kompetensi pengguna tinggi cenderung memiliki kepuasan pengguna yang tinggi. Kemudian Endraria (2016) meneliti tentang kompetensi pengguna dan pengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Hasil penelitian mengatakan bahwa kompetensi pengguna mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi saat informasi dibuat dan dikembangkan. Sedangkan Iskandar (2015) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi. Hasil penelitian berdasarkan analisis deduktif yang mendukung fenomena kemudian

mencari bukti melalui fakta empiris, menyatakan bahwa kompetensi pengguna mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Theory of Reasoned Action* (TRA) untuk mengukur sikap dan perilaku individu terhadap kepuasan penggunaan sistem informasi. TRA yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975), adalah suatu teori yang berhubungan dengan sikap dan perilaku individu dalam melaksanakan kegiatan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, namun ada beberapa perbedaan penelitian yaitu: pertama, pada penelitian ini menggunakan beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi secara bersamaan, seperti budaya organisasi, kompetensi pengguna, komitmen organisasi dan kualitas sistem informasi akuntansi. Kedua, objek penelitian yang dilakukan berbeda karena peneliti mengambil objeknya Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi dan Kompetensi Pengguna Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi. Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu :

1. Masih ditemukannya kendala dalam penerapan sistem elektronik pada pemerintah Daerah.

2. Tata kelola pemerintah yang masih silau dalam penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.
3. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, disebabkan sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung sumber daya manusia yang memadai.
4. Kurangnya pekerja di dinas yang belum memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman dan handal dalam menggunakan sistem.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya, serta objek penelitian lebih ke Organisasi Perangkat Daerah. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “Budaya Organisasi, Kompetensi Pengguna dan komitmen organisasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Medan”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar budaya organisasi berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada OPD di pemerintah kota medan.
2. Seberapa besar komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada OPD di pemerintah kota medan

3. Seberapa besar kompetensi pengguna berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada OPD di pemerintah kota medan.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada OPD di pemerintah kota medan.
2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada OPD di pemerintah kota medan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi pengguna terhadap kualitas sistem informasi akuntansi pada OPD di pemerintah kota medan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang baik bagi Instansi melalui sistem informasi akuntansi yang berkualitas dengan didukung oleh kompetensi pegawai pengelola keuangan.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Kota Medan sebagai acuan dalam membuat kebijakan di masa yang akan datang.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya di sektor pemerintahan.